

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup yang memiliki banyak kebutuhan, kita pasti akan selalu dihadapkan oleh masalah keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya mengharuskan kita untuk bisa menyusun suatu perencanaan dengan baik guna mengoptimalkan nilai manfaat dari sumber daya tersebut. *Basic problem* dalam konsep dasar ilmu ekonomi ini lah yang tidak hanya dialami oleh setiap individu, tetapi setiap Negara termasuk Indonesia pun mengalaminya. Seperti yang dipaparkan pada website Direktorat Jendral Anggaran Republik Indonesia, bahwa “Sumber-sumber penerimaan Negara yang terbatas, dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien”.

Mardiasmo (2009) dalam Halim dan Kusufi (2014:22), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Pemerintah menjadikan anggaran sebagai rencana operasional kegiatan yang di dalamnya terdapat sumber penerimaan pendapatan serta pengeluaran negara. Sedangkan proses dan metode untuk mempersiapkan suatu anggaran disebut penganggaran (Halim dan Kusufi, 2014:22). Dalam sektor pemerintah daerah, anggaran tersebut dikemas dalam sebuah dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat APBD.

Di dalam struktur APBD tersebut terdapat pendapatan daerah yang dijadikan sumber daya untuk menggerakkan roda perekonomian masing-masing daerahnya. Dalam penggunaan sumber daya tersebut, pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan nilai manfaatnya guna menunjang kesejahteraan masyarakat.

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kedudukan APBD sebagai instrumen pengelolaan keuangan daerah pun menjadi sangat penting mengingat di dalamnya tidak hanya terdapat rincian pendapatan atau pembiayaan daerah saja, tetapi juga adanya belanja yang terkait dengan program atau kegiatan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Saat ini penganggaran di Indonesia menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja. Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan (Mardiasmo, 2002:28). Maka dari itu tingginya penyerapan anggaran kerap kali menjadi suatu penilaian bahwa pemerintah telah mengelola keuangan daerah dengan baik. Hal ini diperkuat dengan banyaknya pendapat dari para pakar ekonomi bahwa tinggi rendahnya suatu penyerapan anggaran merupakan indikator keberhasilan suatu birokrasi. Ketika pemerintah daerah gagal dalam merealisasikan anggaran belanja yang tertuang dalam suatu program atau kegiatan, secara tidak langsung masyarakat juga turut kehilangan manfaat dari suatu anggaran. Program atau kegiatan yang telah dianggarkan menjadi tidak terlaksana sehingga *output* yang dapat berupa fasilitas umum seperti pembangunan jalan dan jembatan, pelabuhan, maupun lapangan terbang, menjadi tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Dengan kata lain, di sini telah terjadi adanya pengangguran dana. Padahal bila pemerintah bisa menggunakan dana tersebut dengan pengalokasian anggaran yang lebih efisien, dana tersebut bisa digunakan untuk kegiatan strategis lainnya.

Hingga tahun 2014, pengalokasian anggaran yang tidak efektif dan efisien tersebut masih banyak ditemukan di pemerintah daerah, termasuk Provinsi Banten. Bila dikaitkan dengan konsep dasar ilmu ekonomi di mana keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama, Provinsi Banten seharusnya bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada karena berdasarkan artikel yang ditulis oleh Abdi Amna (2014) dalam website bisnis.com, pada tahun 2014 menurut data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD), Provinsi Banten menunjukkan adanya

peningkatan realisasi pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya. Data menunjukkan peningkatan terjadi di seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada Pajak Daerah yang menjadi komponen terbesar PAD yang meningkat hingga 12.56%.

Namun dalam Perubahan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, pelaksanaan kegiatannya hanya terserap sebesar Rp 6.192.155.567.940,- atau 78.65% dari alokasi belanja daerah sebesar Rp 7.872.703.765.441. Dengan kata lain, Banten memiliki beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 80%. Walaupun presentase mengenai penyerapan anggaran rendah tidak diatur dalam perundang-undangan, pemerintah harus tetap mengupayakan agar penyerapan anggaran sebisa mungkin mendekati 100%. Berikut daftar rekapitulasi pagu dan realisasi anggaran belanja pemerintah Provinsi Banten per SKPD tahun anggaran 2014:

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah
Provinsi Banten Per SKPD Tahun Anggaran 2014**

No.	SKPD	Pagu Anggaran Perubahan (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dinas Bina Marga & Tata Ruang	1.226.752.000.000	391.004.770.599	31.87
2.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	6.844.000.000	2.510.447.732	36.68
3.	Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah	141.300.000.000	70.209.144.000	49.69
4.	RSUD Banten	202.044.000.000	132.083.013.347	65.37
5.	Dinas Kesehatan	147.787.181.350	99.169.033.125	67.10
6.	Badan Kepegawaian Daerah	22.889.405.600	15.921.538.695	69.56
7.	Dinas Sumber Daya Air & Pemukiman	520.872.475.700	381.820.652.350	73.30
8.	Badan Pendidikan & Pelatihan	50.414.000.000	38.158.820.130	75.69
9.	Sekretariat DPRD	164.619.933.131	132.728.666.229	80.63
10.	Dinas Pendidikan	308.524.500.000	252.330.621.853	81.79
11.	Sekretariat Komisi	5.652.000.000	4.694.071.145	83.05

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Penyiaran Indonesia Daerah			
12.	Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika	39.885.890.300	33.156.232.682	83.13
13.	Biro Umum Sekretariat Daerah	140.228.000.000	118.684.624.452	84.64
14.	Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah	14.950.000.000	12.688.488.027	84.87
15.	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	19.017.000.000	16.500.611.020	86.77
16.	Badan Kesehatan Bangsa & Politik	23.071.000.000	20.437.660.738	88.59
17.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	38.008.000.000	33.765.042.708	88.84
18.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.652.000.000	15.927.160.615	90.23
19.	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	34.022.000.000	30.902.341.422	90.83
20.	Dinas Kelautan dan Perikanan	36.691.430.000	33.433.787.062	91.12
21.	Badan Lingkungan Hidup Daerah	22.817.510.000	20.853.239.321	91.39
22.	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	20.052.712.000	18.348.283.192	91.50
23.	Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	29.645.000.000	27.224.062.305	91.83
24.	Dinas Pertanian dan Pertenakan	48.996.000.000	45.122.438.333	92.09
25.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.075.395.359.360	3.754.478.058.608	92.13
26.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.912.000.000	13.789.096.045	92.47
27.	Badan Pemberdayaan Perempuan & Masyarakat	22.893.000.000	21.265.638.335	92.53
28.	Kantor Penghubung	7.716.000.000	7.174.987.680	92.99
29.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah	5.300.000.000	4.938.729.112	93.18
30.	Dinas Pemuda & Olahraga	21.685.000.000	20.220.858.994	93.25
31.	Inspektorat Provinsi	27.265.000.000	25.496.039.962	93.51
32.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.618.200.000	28.663.264.896	93.62
33.	Biro Kesejahteraan Rakyat	38.000.000.000	35.610.781.060	93.71

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

	Sekretariat Daerah			
34.	RSUD Malimping	17.325.298.000	16.309.845.228	94.14
35.	Dinas Koperasi & UMKM	27.164.000.000	25.596.484.704	94.23
36.	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	32.747.870.000	30.932.062.343	94.46
37.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	39.136.000.000	37.158.722.896	94.95
38.	Biro Hukum Sekretariat Daerah	5.000.000.000	4.757.213.397	95.14
39.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah	17.700.000.000	16.929.944.710	95.65
40.	Dinas Pertambangan dan Energi	59.999.000.000	57.787.133.941	96.31
41.	Satuan Polisi Pamong Praja	22.385.000.000	21.670.018.679	96.81
42.	Dinas Sosial	60.983.000.000	59.200.148.262	97.08
43.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	29.723.000.000	28.920.484.572	97.30
44.	DPRD	33.930.000.000	33.581.303.434	98.97
	JUMLAH	7.872.703.765.441	6.192.155.567.940	78.65

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten TA 2014, un-audited (LKPI Gurbenur Banten TA 2014)

Dari tabel di atas kita bisa melihat total Pagu Perubahan Anggaran pada 44 SKPD di Provinsi Banten yaitu sebesar Rp7.872.703.765.441,- dengan realisasi belanja sebesar Rp6.192.155.567.940,-. Dengan kata lain dari rata-rata keseluruhan SKPD yang ada di Provinsi Banten, anggaran belanja di pemerintahan Provinsi Banten tersebut hanya terserap 78.65% dan hanya beberapa SKPD yang realisasi anggarannya mendekati angka 100%. Adapun SKPD yang menduduki peringkat terendah dalam realisasi anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2014 di Provinsi Banten yakni pada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yaitu hanya sebesar Rp391.004.770.599 dari pagu anggaran Rp1.226.752.000.000 atau terserap 31.87%, sedangkan DPRD menduduki peringkat tertinggi dalam realisasi anggaran belanjanya yaitu sebesar Rp33.581.303.434 dari pagu anggaran Rp33.930.000.000 atau terserap 98.97%.

Mengacu pada arah kebijakan keuangan daerah yang tertera dalam Peraturan Gubernur Banten No. 25 Tahun 2014, penganggaran daerah salah satunya harus diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi perencanaan karena perencanaan menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Pedoman tersebut berupa dokumen perencanaan yang terdapat pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017, Rencana Strategis, serta Penetapan Kinerja Tahun 2014 yang harus dicapai sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi. Maka dari itu Faktor Perencanaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran karena apabila kegiatan atau program yang tidak diikuti oleh perencanaan yang matang, maka besar kemungkinan suatu kegiatan atau program tersebut tidak akan terlaksana.

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Kementrian, di mana hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebesar 49,91% yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja adalah Faktor Perencanaan. Hasil dari penelitian Priatno (2013) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar pula menyebutkan bahwa Faktor Perencanaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap rendahnya penyerapan anggaran.

Kerberhasilan suatu birokrasi tidak luput dari peran serta pegawai dalam menjalankan roda pemerintah. Sebagaimana KBBI mendefinisikan birokrasi merupakan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Mustofa (2014:3), birokrasi pemerintahan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan masyarakat, akan tetapi dalam implementasinya birokrasi kadang diidentifikasi dengan suatu pekerjaan yang bertele-tele, lama, rigid (kaku). Bahkan birokrasi menurut Mardiasmo (2004:15, dalam Mustofa 2014:3) dianggap sebagai penyebab

inefisiensi dan penghambat pembangunan, bukan sebagai fasilitator pembangunan, akhirnya birokrasi dicemooh di sana sini.

Pada kenyataannya dalam birokrasi pemerintah khususnya Provinsi Banten sendiri pun masih terdapat kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh beberapa pegawai. Hal tersebut diperkuat dengan adanya informasi yang didapat dari LAKIP BKD Provinsi Banten Tahun 2014. Adapun tabel rekapitulasi penanganan kasus pelanggaran disiplin tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin Tahun 2014

No	Tingkat Pelanggaran	Kasus	Proses	Sisa
I.	Ringan	15	15	0
a	Teguran Lisan	0	0	0
b	Teguran Tertulis	14	14	0
c	Pernyataan Tidak puas Secara Tertulis	1	1	0
II.	Sedang	2	2	0
a	Penundaan Gaji Berkala selama 1 Tahun	0	0	0
b	Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 Tahun	0	0	0
c	Penundaan Kenaikan Pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun	2	2	0
III.	Berat	9	9	0
a	Penurunan Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah 3 (tiga) Tahun	3	3	0
b	Pemindahan Dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah	0	0	0
c	Pemberhentian Dari Jabatan	1	1	0
d	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS	4	4	0
e	Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS	1	1	0
Pemberhentian Sementara		6	6	0
Jumlah Kasus		32	32	0

Sumber: Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai Desember 2014, LAKIP BKD Provinsi Banten Tahun 2014

Dari informasi tabel di atas kita bisa melihat bahwa terdapat tiga tingkat pelanggaran yang terbagi yaitu ringan, sedang, dan berat dengan total keseluruhan sebanyak 32 kasus. Dengan kata lain, para pegawai atau Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Banten masih ada yang belum memenuhi aspek perilaku birokrasi

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pemerintahan sebagaimana yang disebutkan oleh Supriatna (1997:104, dalam Mustofa 2014:34) yaitu tanggung jawab, responsivitas, dan komitmen dan konsisten dalam melayani masyarakat. Penelitian yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada SKPD di Pemerintah Provinsi Bengkulu oleh Putri (2014) juga memperkuat bahwasannya faktor SDM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Lalu kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan faktor yang juga mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran. Tulisan pakar Gayus Lumbuun (2012) menyatakan biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan komponen yang cukup tinggi dalam APBN, setidaknya 35-40% anggaran untuk pengadaan, baik belanja modal maupun barang dan jasa. Fenomena yang terjadi di Provinsi Banten pada tahun 2014 pun menunjukkan banyak kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menjadi penyumbang kegagalan dalam menyerap anggaran. Berikut tabel permasalahan SKPD terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang melalui proses pelelangan.

Tabel 1.3 Permasalahan SKPD Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

No.	SKPD	Permasalahan
1	BMTR (Dinas Bina Marga dan Tata Ruang)	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tidak optimal disebabkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan proses pelelangan pembangunan jalan dan jembatan (lelang ulang) 2. Ada beberapa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang gagal lelang 3. Keterlambatan proses pelaksanaan pembebasan lahan, khususnya yang dilaksanakan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN)
2	ASET (Biro Perlengkapan dan Aset)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan tanah waduk sendang heula tidak direalisasikan karena pihak Kantor Pertahanan Kab. Serang mengembalikan dokumen pengadaan kepada Provinsi Banten - Pengadaan tanah untuk kantor samsat malingping tidak dapat terealisasikan karena pemilik tanah menghendaki nilai ganti kerugian sebesar Rp575.000/m² s.d Rp600.000/m², sedangkan menurut Tim Apraisal tanah tersebut dinilai Rp313.000/m² - Pengadaan tanah untuk kantor samsat ciruas tidak

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

		direalisasikan karena kekurangan anggaran dari pagu sebesar Rp7.000.000, sedangkan hasil penilaian Tim Appraisal sebesar Rp14.482.250.000
3	RSUDB (Rumah Sakit Umum Daerah Banten)	- Kegiatan peningkatan sarana prasarana barang medis RSUD Banten, realisasi keuangan tidak sesuai target karena ada satu jenis alat kesehatan yang diimport
4	DINKES (Dinas Kesehatan)	- Pengadaan sarana penunjang alat kesehatan pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan RS Labuan tidak dilaksanakan karena RS Labuan belum beroperasi - Pengadaan alat penunjang pemeriksaan mikroskop malaria pada Kegiatan Pembinaan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang tidak dilaksanakan karena adanya kenaikan harga
5	SDAP (Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman)	- Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air disebabkan permasalahan pelelangan seperti batal lelang sebanyak 7 paket dan gagal lelang sebanyak 1 paket yang semakin mempersempit waktu pelaksanaan pembangunan. Selain itu ada pula batal kontrak sebanyak 3 paket dan putus kontrak dengan penyedia sebanyak 1 paket , optimasi karena arahan BPK 3 paket pekerjaan, permasalahan lahan hingga adanya pekerjaan terhutang yang belum dibayarkan sebanyak 5 paket pekerjaan yang melewati TA 2014 sebanyak 3 paket pekerjaan - Permasalahan pelaksanaan Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Pemukiman disebabkan permasalahan pelelangan seperti batal lelang sebanyak 12 paket dan gagal lelang sebanyak 10 paket yang semakin mempersempit waktu pelaksanaan. Selain itu terdapat pula batal kontrak sebanyak 18 paket dan putus kontrak dengan penyedia sebanyak 1 paket , optimasi pekerjaan sebanyak 1 paket pekerjaan hingga adanya pekerjaan terhutang yang belum dibayarkan sebanyak 24 paket pekerjaan serta pekerjaan yang melewati TA 2014 sebanyak 2 paket pekerjaan - Permasalahan pelaksanaan Program Pembinaan dan Penataan Perumahan disebabkan terjadinya gagal lelang sebanyak 19 paket pekerjaan
6	DINDIK (Dinas Pendidikan)	- Kegiatan Pengembangan PAUD terjadi gagal lelang dalam pengadaan laptop - Kegiatan Fasillitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi terjadi gagal lelang pada pekerjaan E-Teaching Digital Multimedia Perguruan Tinggi/Podium Digital Interaktif - Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan terjadi gagal lelang pengadaan mesin jahit, manekin, dan mesin obras

Sumber: data primer diolah, LKPj Gurbenur Banten TA 2014

Berdasarkan informasi di atas yang diperoleh dari LKPj Gurbenur Banten TA 2014 bahwa keterlambatan proses lelang atau gagal lelang, batalnya suatu kontrak atau putus kontrak, dan permasalahan terkait pembebasan tanah pun menjadi penyumbang tidak terserapnya sejumlah anggaran. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arif dan Abdul Halim (2013) bahwa faktor pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Dari penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab rendahnya penyerapan anggaran di pemerintahan Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2014 ialah akibat dari beberapa faktor, yaitu dimulai dari adanya Faktor Perencanaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa. Walaupun terdapat kesamaan fenomena dengan penelitian sebelumnya, peneliti tetap meyakini bahwa akan adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing birokrasi yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran, khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Banten tahun 2014 dengan judul **“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2014)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terungkap, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana gambaran tentang perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, realisasi pengadaan barang dan jasa, serta tingkat penyerapan anggaran belanja di SKPD Provinsi Banten Tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh Faktor Perencanaan terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014?

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014?
4. Bagaimana pengaruh Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, realisasi pengadaan barang dan jasa, serta tingkat penyerapan anggaran belanja di SKPD Provinsi Banten
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor perencanaan anggaran terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh realisasi pengadaan barang dan jasa terhadap tingkat penyerapan anggaran belanja SKPD Provinsi Banten Tahun 2014.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas pengetahuan tentang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan ilmu pemerintahan mengenai keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Tisa Indriani, 2016

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA DAERAH

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. **Bagi Akademisi:** hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat penyerapan anggaran belanja daerah pada SKPD di Pemerintah Provinsi Banten tahun 2014.
2. **Bagi Pemerintah Daerah:** hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan dalam proses perencanaan dan penganggaran pada kegiatan pemerintah daerah khususnya di SKPD, pengelolaan keuangan SKPD, dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan SKPD terkait dengan penyerapan anggaran tersebut.
3. **Bagi Peneliti:** penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti sehingga dapat diperoleh gambaran lebih jelas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran belanja pada SKPD di Pemerintah Provinsi Banten tahun 2014.